

BAURAN KEBIJAKAN APA YANG DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN BAGI MASYARAKAT AGRARIS?

Mirdha Fahlevi SI¹; Nabila Hilmy Zhafira²
Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat^{1,2}
Email : mirdha.fahlevi@utu.ac.id ; nabilahilmyzhafira@utu.ac.id

ABSTRAK

Lembaga jasa keuangan berperan penting sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat agraris. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa akses masyarakat agraris terhadap berbagai layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan masih sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai pendekatan yang dapat digunakan sebagai buaran kebijakan peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat agraris yang berdomisili di Provinsi Aceh. Pendekatan Model kano digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. bahwa terdapat satu atribut layanan yang termasuk dalam kategori *attractive*, sembilan indikator dalam kategori *must be* dan dan tujuh indikator dalam kategori *one dimensional*. Penelitian ini merekomendasikan enam alternatif pendekatan yang dapat digunakan sebagai bauran kebijakan peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris. Hasil penelitian ini sangat relevan dalam rangka mendukung tujuan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yaitu mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan; Inklusi Keuangan; Masyarakat Agraris

ABSTRACT

Financial institutions plays an important role as catalysts in economic development for agrarian society. However, accessibility of agrarian society to various financial services from financial institutions is still limited. This research aimed to investigate various approaches which possible to be implemented as policies for increasing financial inclusion for the agrarian society. The population in this research is the agrarian society in Aceh Province. Kano model approach is used as the method in this research. The results show there is one service attribute is included in the attractive category, nine indicators in the must be category and seven indicators in the one dimensional category. This research recommends six alternative approaches that can be used as a policy mix to increase financial inclusion for agrarian society. The results of this research are very relevant in order to support one of the goal of the National Financial Literacy Strategy of Indonesia, which is to encourage financial institutions to provide financial services suitable with agrarian society needs.

Keywords : Policy; Financial Inclusion; Agrarian Society

PENDAHULUAN

Ketersediaan akses pada lembaga keuangan bagi masyarakat agraris merupakan sebuah kebutuhan dalam pembangunan perekonomian. Kehadiran lembaga jasa

keuangan akan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi produktif di bidang pertanian yang dapat menjadi katalisator pembangunan. Akses terhadap lembaga keuangan berperan penting dalam menekan tingkat probabilitas kemiskinan absolut di wilayah pedesaan, menekan laju urbanisasi (Dawood et al., 2019), mendorong pertumbuhan ekonomi (Dewi et al., 2018) dan alokasi modal yang lebih efisien antar berbagai sektor ekonomi serta distribusi kekayaan yang lebih merata (Wibowo, 2019).

Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa akses masyarakat agraris terhadap lembaga keuangan formal masih sangat terbatas (Darwis et al., 2023). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, Indeks literasi dan inklusi keuangan petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan terendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tidak bekerja (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat agraris merupakan bagian dari strategi keuangan nasional inklusi yang telah dituangkan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres RI Nomor 114 Tahun 2020, 2020). Peraturan Presiden RI tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan perluasan dan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021-2025 menetapkan petani dan nelayan sebagai salah satu kelompok dari 10 kelompok sasaran prioritas peningkatan literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Akses terhadap lembaga keuangan merupakan komponen penting dalam pengembangan sektor pertanian dan telah menjadi perhatian khusus para penyusun kebijakan di bidang pertanian terutama di negara berkembang (Wulandari et al., 2017). Pada saat ini, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat agraris. Pemerintah Indonesia telah merilis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), program tersebut memfasilitasi bantuan pinjaman modal usaha kepada para petani (Darwis et al., 2023). Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program kredit usaha rakyat (Wulandari et al., 2017).

Meskipun pemerintah telah merilis berbagai program kredit dan pembiayaan di bidang pertanian bagi masyarakat agraris, kebijakan tersebut belum mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat agraris. Hanya segmen tertentu saja yang dapat mengakses pendanaan melalui kredit yang disediakan oleh perbankan. Bahkan, kegiatan usaha di bidang agraris yang dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari perbankan masih di bawah 1 persen. Sedangkan sumber dana lainnya bersumber dari *owner equity* (Wibowo, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional sektor pertanian masih sangat terbatas yang bersumber dari lembaga keuangan formal.

Faktor literasi keuangan merupakan penghambat bagi para petani dalam mengakses layanan keuangan formal (Widhiyanto et al., 2018). Kondisi para petani pada saat ini menunjukkan bahwa bahwa indeks pengetahuan keuangan (*financial knowledge index*) sebesar 0,48. Sedangkan indeks perilaku keuangan (*financial behavior index*) hanya sebesar 0,35. Angka tersebut menunjukkan bahwa indeks pengetahuan keuangan dan indeks perilaku keuangan masih sangat rendah (K. A. Safitri, 2021).

Aksesibilitas masyarakat agraris yang rendah terhadap layanan keuangan formal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat suku bunga yang tinggi, ketersediaan agunan, informasi yang minim, pasokan kredit yang tidak memadai, prosedur yang panjang dan jarak yang relatif jauh antara petani dengan kantor lembaga keuangan (Asnawi et al., 2019), faktor usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang kredit (Blay et al., 2013). Selanjutnya, kualitas kelompok tani (Harianto et al., 2019), luas lahan budidaya, kepemilikan agunan, tingkat suku bunga, status hukum kelompok tani dan pengalaman dalam mengakses kredit (Widhiyanto et al., 2018) juga menjadi determinan aksesibilitas masyarakat agraris terhadap layanan keuangan formal.

Pembangunan perekonomian masyarakat agraris melalui optimalisasi peran lembaga jasa keuangan (LJK) merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional Indonesia sebagai negara agraris (Darwanto et al., 2019). Kehadiran lembaga keuangan formal akan mendorong perluasan layanan keuangan berupa layanan pembiayaan/kredit bagi para petani yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan (Purmiyati et al., 2019). Keberhasilan pengentasan kemiskinan masyarakat agraris merupakan komponen penting dalam kesuksesan pembangunan Indonesia di kawasan pedesaan yang

mayoritas pencaharian masyarakatnya bersumber dari sektor pertanian dan perikanan (Anwar et al., 2019).

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan masyarakat dilakukan dengan cara penyediaan akses layanan keuangan kepada segmen masyarakat tertentu, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Majid et al., 2019). Golongan masyarakat tersebut masih sangat terbatas kemampuannya dalam mengakses berbagai layanan keuangan formal (Ismail, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat agraris, khususnya yang berdomisili di Provinsi Aceh. Pada saat ini, penelitian yang secara spesifik membahas bentuk layanan keuangan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat agraris pada suatu wilayah tertentu masih sangat terbatas.

Layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agraris merupakan salah satu komponen penting dalam pengentasan kemiskinan yang masih parah di Provinsi Aceh. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Pada bulan September 2022, angka kemiskinan di Aceh mencapai 14,75 persen. Jika dilihat secara spesifik berdasarkan wilayah, kemiskinan di kawasan perkotaan hanya sebesar 10,34 persen. Sedangkan kemiskinan di wilayah pedesaan, mencapai 17,06 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur yang spesifik mengkaji tentang bentuk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu. Penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat telah menjadi perhatian pemerintah pada saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (2021) telah menetapkan empat tujuan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, salah satunya adalah mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Masyarakat agraris di Aceh merupakan salah satu segmen masyarakat yang membutuhkan intervensi khusus supaya mereka dapat mengakses layanan yang tersedia pada lembaga keuangan formal. Intervensi khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris. Inklusi keuangan kepada kelompok

masyarakat tersebut merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka pengentasan kemiskinan yang masih relatif tinggi di Aceh.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, otoritas jasa keuangan dan perbankan serta para pemangku kepentingan terkait. Bagi pemerintah dan otoritas jasa keuangan, hasil penelitian dapat menjadi salah satu input informasi dalam menyusun kebijakan yang dapat mempercepat perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat agraris di Aceh. Bagi lembaga keuangan formal, hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam menyusun produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agraris di Aceh

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Inklusi keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (2021) menyebutkan bahwa inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Inklusi keuangan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses kredit yang terjangkau yang berdampak peningkatan berbagai kegiatan ekonomi produktif, peningkatan standar hidup dan pengurangan tingkat kemiskinan. Pertimbangan berbasis kebutuhan dan kemampuan masyarakat merupakan dua faktor mendasar yang harus dipertimbangkan dalam menyusun pengembangan sistem keuangan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keterkaitan antara inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *financial structuralist theory*. Teori tersebut menjelaskan bahwa pengembangan sistem keuangan merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di kawasan pedesaan (Wibowo, 2019). Kehadiran lembaga keuangan akan mendorong lahirnya berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas usahanya.

Layanan keuangan yang inklusif berupa tersedianya akses layanan keuangan bagi masyarakat tani akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam melakukan pengembangan berbagai aktivitas usaha. Kehadiran lembaga keuangan akan berdampak terhadap pengembangan sektor pertanian di kawasan pedesaan (Herwartz & Walle, 2014). Masyarakat dapat menggunakan berbagai layanan keuangan yang tersedia dalam

mengembangkan berbagai kegiatan usahanya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi (James B. Ang, 2010).

Mwangi & Atieno, (2018) menjelaskan bahwa keterkaitan antara inklusi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dengan menggunakan dua saluran, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Inklusi keuangan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan cara mereduksi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan melalui perluasan akses terhadap produk transaksi, kredit, tabungan dan asuransi. Sedangkan secara tidak langsung, inklusi keuangan akan mendorong stimulasi pertumbuhan keuangan di kalangan masyarakat

Theory of Planned Behavior (TPB)

Salah satu faktor yang menjadi determinan kesuksesan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris adalah tingkat pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Pemahaman terhadap berbagai produk keuangan dan lembaga yang tersedia merupakan langkah awal bagi setiap para pelaku usaha. Pemahaman tersebut akan menjadi panduan bagi mereka dalam menggunakan layanan keuangan yang tepat dalam menjalankan aktivitas usahanya. Literasi keuangan yang memadai juga akan berdampak terhadap kesejahteraan keuangan (Safitri et al., 2022)

Kualitas pengetahuan sangat menentukan intensi mereka dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh perbankan. Semakin baik kualitas pengetahuan yang mereka miliki, maka kecenderungan untuk menggunakan layanan keuangan juga akan semakin meningkat. *Theory of planned behavior* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami intensi orang untuk menggunakan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu (Widaninggar et al., 2023).

Theory of planned behaviour (TPB) yang dikemukakan oleh Azjen pada tahun 1991 merupakan landasan teoritis yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku manusia. Teori ini menyebutkan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah sikap, *subjective norms* (SN) dan *perceived behavioral control* (PBC) (Thomas & Subhashree, 2020). Keyakinan,

sikap, dan niat perilaku mempengaruhi seseorang dalam proses pengambilan keputusan (Mamun et al., 2023). Penggunaan layanan keuangan yang tersedia merupakan bentuk keputusan yang sangat erat berkaitan dengan keyakinan, sikap dan pengetahuan mereka tentang produk layanan keuangan yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat agraris. Kriteria masyarakat agraris dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonominya di berbagai bidang pertanian. Populasi masyarakat agraris yang digunakan merujuk pada data Badan Pusat Statistik, yaitu rumah tangga usaha pertanian (BPS Aceh, 2018). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan tingkat konfidensi 95 persen dengan *sampling error* sebesar 7 persen untuk penentuan jumlah sampel

Atribut Layanan Perbankan

Penelitian ini menggunakan lima dimensi layanan pada lembaga keuangan. Dimensi tersebut antara lain meliputi prosedur pengajuan kredit dan tingkat suku bunga/margin, *credit terms and conditions*, *shariah compliance*, *digitalization* dan *human skills*. Dimensi prosedur pengajuan kredit dan tingkat suku bunga/margin dan dimensi *credit terms and conditions* masing-masing terdiri dari lima atribut layanan. Dimensi *shariah compliance* dan *human skills* masing-masing masing terdiri dari dua atribut layanan. Sedangkan dimensi *digitalization* terdiri dari tiga atribut layanan.

Atribut layanan pada dimensi prosedur pengajuan kredit dan tingkat suku bunga/margin serta *credit terms and conditions* menggunakan atribut layanan yang diadopsi dari atribut yang dikemukakan oleh Lualhati et al., (2018). Adapun atribut layanan pada dimensi *shariah compliance*, *digitalization* dan *human skills* menggunakan atribut yang dikemukakan oleh Zouari & Abdelhedi (2021). Total semua atribut layanan lembaga keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 atribut

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah kuesioner kano yang terdiri dari dua komponen yaitu *functional*

question dan *dysfunctional question* (Wijaya, 2018). Komponen *functional question* merupakan bagian dari pernyataan dalam kuesioner yang menyatakan kondisi yang dirasakan oleh responden apabila atribut layanan tersedia pada lembaga keuangan. Sedangkan komponen *dysfunctional question* merupakan bagian dari pernyataan dalam kuesioner yang menyatakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi yang dirasakan oleh responden apabila atribut layanan tidak tersedia. Setiap pernyataan pada kedua bagian kuesioner, para responden memilih salah satu dari lima pilihan jawaban yang tersedia. Kelima pilihan jawaban tersebut terdiri dari suka (S), mengharapkan (M), netral (N), memberi toleransi (MT) dan tidak suka (TS) (Wijaya, 2018 ; Algifari, 2019)

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan model kano. Evaluasi model kano mengelompokkan atribut layanan perbankan menjadi enam kategori yang meliputi *attractive*, *must-be*, *one dimensional*, *indifferent*, *reverse* dan *questionable* (Wijaya, 2018). Atribut layanan yang termasuk dalam kategori *attractive* menunjukkan bahwa kepuasan pengguna layanan akan meningkat apabila kualitas atribut tersebut meningkat, namun kepuasan pengguna layanan tidak menurun apabila kualitas atribut tersebut tidak tersedia. Atribut layanan yang termasuk dalam kategori *must-be* menunjukkan bahwa atribut layanan tersebut merupakan sebuah keharusan (Algifari, 2019)

Atribut layanan yang termasuk dalam kategori, *one dimensional* menunjukkan bahwa kualitas layanan pada atribut tersebut akan meningkatkan kepuasan pengguna layanan, sebaliknya apabila atribut tersebut tidak tersedia, maka akan berdampak pada penurunan kepuasan pengguna layanan. Atribut layanan yang termasuk dalam kategori *indifferent* menunjukkan bahwa atribut tersebut tidak berdampak terhadap kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya, atribut layanan yang termasuk dalam kategori *reverse* menunjukkan bahwa atribut tersebut berdampak terhadap penurunan kepuasan pengguna layanan. Sedangkan atribut yang termasuk dalam kategori *questionable* menunjukkan bahwa atribut tersebut mendapat respon yang tidak konsisten dari para responden (Algifari, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat agraris yang berdomisili di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Para responden berjumlah 237 orang. Tabulasi silang profil responden berdasarkan usia dan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.

Hasil Identifikasi Atribut Layanan Menggunakan Model Kano

Berdasarkan identifikasi atribut layanan dengan menggunakan model kano menunjukkan bahwa terdapat satu atribut layanan yang termasuk dalam kategori *attractive* (A), sembilan indikator dalam kategori *must be* (M) dan dan tujuh indikator dalam kategori *one dimensional* (O). Sedangkan tiga kategori lainnya yaitu *indifferent* (I), *reverse*(R) dan *questionable* (Q) tidak terdapat satupun atribut layanan yang termasuk dalam kategori tersebut. Hasil identifikasi atribut layanan dengan menggunakan model kano disajikan dalam tabel 2.

Atribut Layanan yang *Attractive*

Persyaratan dokumen pengajuan kredit yang ringkas/sederhana merupakan satu satunya atribut layanan lembaga keuangan yang termasuk dalam ketegori *attractive* bagi masyarakat agraris di Provinsi Aceh. Apabila lembaga keuangan menerapkan sistem administrasi yang sederhana dalam pengajuan kredit, maka mereka akan sangat senang dan terdorong untuk mengakses berbagai layanan keuangan yang tersedia. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa persyaratan adminisitrasi yang rumit merupakan salah satu penghambat bagi masyarakat agraris dalam mengakses berbagai layanan keuangan formal. Lembaga keuangan perlu mempertimbangkan untuk memberlakukan sistem administrasi yang sederhana dalam rangka meningkatkan keinginan masyarakat agraris dalam mengakses berbagai layanan keuangan dalam rangka mendorong pencapaian inklusi keuangan bagi masyarakat agraris.

Atribut Layanan yang termasuk dalam Kategori *Must Be*

Atribut layanan yang termasuk dalam kategori *must be* merupakan atribut layanan yang mutlak harus tersedia pada lembaga keuangan. Terdapat sembilan atribut yang termasuk dalam kategori *must be*. Secara lebih rinci, kesembilan atribut tersebut adalah sebanyak masisng-masing dua atribut dari dimensi prosedur pengajuan kredit dan tingkat suku bunga/margin, satu atribut dari dimensi *credit terms and conditions*, dua atribut dari dimensi *shariah compliance*, dua atribut dari dimensi *digitalization* dan dua atribut dari dimensi *human skills*.

Pada dimensi prosedur pengajuan kredit dan tingkat suku bunga/margin terdapat dua atribut layanan yang termasuk dalam kategori *must be*. Pertama, atribut layanan berupa ketersediaan informasi lengkap tentang persyaratan pengajuan kredit/pembiayaan. Kedua, atribut layanan berupa akad pembiayaan menyajikan secara komprehensif jumlah pembiayaan, tingkat bunga/margin dan tanggal jatuh tempo. Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus menginformasikan kepada nasabah dengan jelas dan lengkap persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan bagi masyarakat agraris. Selain itu, akad pembiayaan bagi masyarakat agraris harus menyajikan secara komprehensif jumlah pembiayaan, tingkat bunga/margin dan tanggal jatuh tempo secara jelas dan terperinci.

Atribut layanan pada dimensi *credit terms and conditions* yang termasuk dalam kategori *must be* adalah ketersediaan informasi tentang tingkat bunga/margin apabila nasabah melakukan pelunasan dengan jadwal yang berbeda dengan tenor pinjaman/kredit. Perbankan perlu melakukan pendekatan afirmatif kepada masyarakat agraris dengan cara memberi diskon tingkat bunga/margin apabila mereka melakukan pelunasan lebih cepat dari tenor pinjaman yang telah disepakati. Langkah tersebut sangat perlu dipertimbangkan karena siklus pendapatan masyarakat agraris sangat tergantung pada musim panen dari aktivitas pertaniannya.

Dimensi *shariah compliance*, terdapat dua atribut yang termasuk dalam kategori *must be*. Pertama, produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, lembaga keuangan menyediakan produk investasi dengan sistem bagi hasil. Informasi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk keuangan dengan menggunakan prinsip syariah merupakan sebuah aspek yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang melayani masyarakat agraris di Aceh

Dimensi *digitalization* terdapat dua atribut termasuk dalam kategori *must be*. *Pertama*, lembaga menyediakan layanan dan aplikasi *mobile banking*. Kedua, lembaga aktif di platform sosial media seperti instgram, facebook dan lain-lain. Keaktifan lembaga perbankan di berbagai media sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat agraris dalam rangka memberi informasi tentang berbagai layanan keuangan yang tersedia.

Dimensi *human skills*, terdapat dua atribut yang termasuk dalam kategori *must be*. Pertama, berupa pegawai memberi asistensi kepada nasabah ketika ada kendala

dalam bertransaksi. Kedua, pegawai memberi informasi dengan tepat tentang jenis layanan yang tersedia pada lembaga keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa asistensi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat agraris.

Atribut Layanan yang termasuk dalam Kategori *One dimensional*

Atribut layanan yang termasuk dalam kategori *one dimensional* merupakan atribut yang apabila kualitasnya meningkat, maka kepuasan pengguna layanan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila kualitasnya menurun, maka kepuasan masyarakat agraris dalam menggunakan layanan juga akan menurun. Tingkat kepuasan tersebut akan berdampak linear terhadap intensi mereka dalam menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan. Ketika kepuasannya naik, maka intensi mereka akan meningkat. Sebaliknya, ketika kepuasan menurun, maka intensi mereka juga akan menurun.

Dimensi prosedur pengajuan kredit dan tingkat suku bunga/margin, terdapat dua atribut yang termasuk dalam kategori *one dimensional*. Pertama, agunan pembiayaan dapat dipenuhi dengan mudah oleh para nasabah. Kedua, tingkat suku bunga/margin yang terjangkau. Persyaratan berupa agunan yang disyaratkan oleh perbankan dan tingkat suku bunga/margin yang berlaku sangat menentukan minat masyarakat agraris untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal.

Semakin mudah dijangkau persyaratan agunan yang ditetapkan, maka akan mendorong masyarakat agraris untuk menggunakan layanan keuangan formal. Sebaliknya, apabila persyaratan agunan yang ditetapkan terlalu berat, maka intensi masyarakat agraris untuk menggunakan layanan keuangan menjadi semakin berkurang. Kondisi yang sama juga berlaku pada tingkat suku bunga/margin yang ditentukan oleh lembaga keuangan. Semakin rendah tingkat suku bunga/marginnya, maka akan mendorong peningkatan intensi masyarakat agraris dalam menggunakan layanan keuangan formal. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat suku bunga, makna intensi masyarakat agraris menggunakan layanan keuangan formal akan berkurang.

Selanjutnya, terdapat empat atribut layanan pada dimensi *credit terms and conditions* yang termasuk dalam kategori *one dimensional*. Pertama, tidak ada denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan kredit. Kedua, nasabah mendapat diskon bunga/margin apabila melakukan pelusan kredit lebih cepat dari

tenornya. Ketiga, nasabah dapat menunda pembayaran cicilan hingga musim panen tiba. Keempat, fleksibilitas dalam menyetor cicilan bulanan.

Masyarakat agraris menginginkan adanya layanan keuangan berupa kredit yang memberi keistimewaan kepada mereka dengan cara tidak ada denda apabila terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan dan tersedianya diskon bunga/margin apabila mereka melakukan pelunasan kredit lebih cepat dibandingkan dengan tenornya. Masyarakat agraris juga menginginkan adanya fleksibilitas dalam melakukan pembayaran cicilan bulanan dan penundaan pembayaran cicilan hingga musim panen. Apabila berbagai keistimewaan tersebut diberlakukan oleh perbankan, maka intensi mereka untuk menggunakan layanan keuangan formal akan semakin meningkat.

Atribut layanan pada dimensi *human skills* yang termasuk dalam kategori *one dimensional* adalah jam operasional bank sesuai dengan kondisi nasabah yang dilayani. Masyarakat agraris menginginkan adanya kegiatan operasional perbankan yang sesuai dengan siklus aktivitas mereka. Terkadang, masyarakat agraris tidak dapat mengakses layanan keuangan formal karena aktivitas mereka yang tidak sesuai dengan kegiatan operasional perbankan. Biasanya, pagi hari masyarakat agraris sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Sedangkan pada malam hari, aktivitas perbankan sudah tidak beroperasi. Jadwal yang tidak *matching* tersebut menyebabkan masyarakat agraris mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal. Apabila perbankan menyesuaikan jadwal operasionalnya dengan jadwal aktivitas masyarakat agraris, maka intensi mereka untuk menggunakan layanan keuangan formal akan semakin meningkat.

Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris di Aceh

Hasil analisis model kano dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan upaya peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris. beberapa bentuk pendekatan yang dapat digunakan sebagai bauran kebijakan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris di Aceh disajikan dalam tabel 3. Keenam bentuk pendekatan pada tabel tersebut merupakan bauran kebijakan yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agraris dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. Langkah teknis implementasi dari setiap bentuk pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pendekatan I : Penyederhanaan Administrasi Pengajuan Kredit Bagi Masyarakat Agraris

Penyederhanaan administrasi pengajuan pinjaman bagi masyarakat agraris berkaitan dengan atribut layanan yaitu Persyaratan dokumen pengajuan kredit yang ringkas/ sederhana. Atribut tersebut termasuk dalam kategori atribut layanan yang *attractive*. Penyederhanaan administrasi pengajuan kredit akan meningkatkan intensi masyarakat agraris dalam menggunakan layanan keuangan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa petani dan masyarakat berpenghasilan rendah masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam mengakses berbagai layanan pada lembaga keuangan (Ismail, 2021; Ndem et al., 2023).

Lembaga keuangan perlu melakukan penyederhanaan berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit. Fakta saat ini menunjukkan bahwa persyaratan pengajuan kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan merupakan faktor penentu akses petani kecil terhadap layanan (Ouattara et al., 2020). Jika persyaratan pengajuan kredit terlalu rumit, maka para masyarakat agraris akan mengalami kesulitan dalam mengakses produk keuangan tersebut.

Salah satu bentuk langkah kongkrit yang dapat menjadi alternatif untuk diterapkan oleh lembaga keuangan adalah menetapkan kebijakan persyaratan administrasi hanya berupa foto copy KTP, kartu keluarga elektronik dan surat keterangan kegiatan/usaha tani dari kepala desa sebagai persyaratan administrasi dalam mengajukan pinjaman. Ketiga dokumen tersebut merupakan persyaratan administrasi yang sangat mudah dipenuhi oleh masyarakat agraris. Administrasi yang sangat sederhana akan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan kredit yang tersedia pada lembaga keuangan.

Pendekatan II : Diseminasi dan Edukasi Tentang Sektor Jasa Keuangan dan Layanan Keuangan Kepada Masyarakat Agraris

Diseminasi pengetahuan tentang sektor jasa keuangan merupakan hal yang sangat krusial dalam pengembangan kegiatan pertanian masyarakat agraris. Kondisi saat ini menunjukkan petani dan nelayan belum menjadi salah satu fokus sasaran edukasi keuangan. Sebagai langkah awal, masyarakat agraris perlu dibekali dengan pengetahuan tentang layanan jasa keuangan yang meliputi pengetahuan terkait jenis lembaga keuangan formal dan informal, identifikasi lembaga jasa keuangan yang berizin dan tidak berizin, dan cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia.

Pengetahuan tersebut perlu dibekali kepada masyarakat sebelum mereka menggunakan berbagai produk dan jasa keuangan yang tersedia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Diseminasi pengetahuan tentang sektor jasa keuangan bagi masyarakat agraris perlu difokuskan pada penguatan pengetahuan tentang berbagai layanan keuangan yang tersedia. Sebagai langkah kongkrit, kegiatan diseminasi layanan keuangan bagi masyarakat agraris perlu difokuskan pada dua kegiatan utama. Pertama, kegiatan diseminasi difokuskan memberi informasi kepada masyarakat agraris tentang berbagai produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang potensial dapat digunakan oleh masyarakat agraris dalam rangka mendukung kegiatan operasional pertanian mereka. Fokus yang kedua adalah memberi informasi tentang persyaratan pengajuan kredit bagi masyarakat agraris yang bergerak di bidang usaha pertanian.

Pendekatan III : Penyediaan Kredit Lunak dan Kredit Tanpa Agunan Kepada Masyarakat Agraris

Tingkat suku bunga yang tinggi dan kesulitan petani dalam memenuhi persyaratan agunan yang ditetapkan oleh perbankan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat agraris (Ouattara et al., 2020; Henning et al., 2019). Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan dari perbankan dan berbagai lembaga keuangan lainnya. Intervensi pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan dalam rangka membantu para petani yang terkendala dengan ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan agunan.

Terdapat dua langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait. Pertama, lembaga keuangan menyalurkan kredit lunak/kredit dengan tingkat bunga rendah. Pendekatan yang kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan layanan keuangan berupa kredit tanpa agunan. Pada saat ini, kehadiran lembaga keuangan mikro di berbagai daerah telah berhasil mengimplementasikan kredit tanpa agunan kepada masyarakat agraris (Asnawi et al., 2021). Konsep kredit tanpa agunan dapat diasopsi oleh lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Aceh. Kedua langkah tersebut akan menjadi katalisator bagi masyarakat agraris dalam mengakses kredit/pembiayaan dari lembaga layanan keuangan formal. Pemangku kepentingan terkait lainnya, yaitu pemerintah perlu berperan sebagai regulator dan menerapkan pengawasan yang efektif

dan efisien untuk memantau kebijakan penyaluran kredit di sektor pertanian (Ndem et al., 2023).

Pendekatan IV : Digitalisasi Layanan Keuangan Kepada Masyarakat Agraris

Perkembangan zaman yang semakin canggih mendorong munculnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan platform digital. Pada saat ini, berbagai lembaga keuangan telah mengadopsi teknologi digital dalam rangka menyediakan layanan yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman (Shofiah et al., 2021). Oleh sebab itu, digitalisasi layanan keuangan bagi masyarakat agraris telah menjadi sebuah kebutuhan pada saat ini.

Langkah kongkrit pertama yang dapat digunakan sebagai bentuk digitalisasi layanan keuangan adalah lembaga keuangan perlu menyediakan layanan dan aplikasi *mobile banking* yang untuk menjangkau berbagai kebutuhan transaksi masyarakat agraris. Pendekatan ini akan melahirkan berbagai platform bagi masyarakat agraris untuk melakukan kegiatan pengajuan kredit, tabungan dan investasi pada lembaga keuangan formal secara online.

Kehadiran layanan digital akan memberi kemudahan bagi masyarakat agraris tanpa harus berkunjung ke kantor lembaga keuangan untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia. Layanan keuangan digital dapat menjadi katalisator dalam mendorong pencapaian inklusi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Digitalisasi layanan keuangan menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang sangat relevan seiring dengan bertambahnya jumlah generasi muda pada masyarakat agraris.

Langkah yang kedua adalah berbagai jenis lembaga keuangan formal juga sangat perlu untuk aktif di berbagai platform media sosial. Keaktifan di media sosial tersebut sangat penting dalam rangka memperluas informasi tentang layanan perbankan kepada kelompok masyarakat agraris. Digitalisasi layanan keuangan juga menjadi hal penting dalam rangka mendesiminasikan berbagai produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agraris.

Pendekatan V : Fleksibilitas Sistem Pengajuan Kredit dan Layanan Perbankan Bagi Masyarakat Agraris

Sebagian besar sistem perbankan yang berlaku pada saat ini belum sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat agraris. Prosedur pengajuan pinjaman dan periode pembayaran cicilan yang kaku sering menjadi penghambat bagi

masyarakat agraris untuk memperoleh berbagai akses layanan pada lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan akses layanan keuangan bagi masyarakat agraris belum memadai (Yazid et al., 2021).

Lembaga keuangan perlu merevisi prosedur pengajuan pinjaman dan periodisasi pembayaran cicilan yang masih kaku (Kiros & Meshesha, 2022). Terdapat tiga langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan fleksibilitas sistem pengajuan kredit dan layanan perbankan bagi masyarakat agraris. Pertama, fleksibilitas sistem pengajuan kredit. Kedua, penyediaan produk pembiayaan yang sesuai dengan siklus penghasilan masyarakat agraris. Ketiga, diversifikasi *delivery channel* lembaga keuangan.

Fleksibilitas sistem pengajuan kredit dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, tidak memberi denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan kredit. Kedua, memberi diskon bunga/margin apabila nasabah melakukan pelunasan kredit lebih cepat dari tenornya. Selanjutnya, penyediaan produk pembiayaan yang sesuai dengan siklus penghasilan masyarakat agraris dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, menyediakan layanan kredit yang sesuai dengan musim panen dan siklus pendapatan masyarakat agraris. Kedua, menerapkan fleksibilitas dalam menyetor cicilan bulanan.

Berikut ini adalah ilustrasi alternatif bentuk fleksibilitas layanan pembiayaan kepada masyarakat agraris. Seorang petani mengajukan pinjaman kredit lunak sebesar Rp 6.000.000 dengan tenor satu tahun. Cicilan bulanan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 500.000. Fleksibilitas layanan pembiayaan dilakukan dengan cara memberi keringanan kepada masyarakat agraris untuk membayar cicilan bulanan minimum 70 persen dari jumlah cicilan bulanan. Sedangkan sisanya dapat dibayar ketika musim panen tiba atau ketika masa tenornya telah berakhir.

Pendekatan diversifikasi *delivery channel* dilakukan dengan pendekatan untuk memberi berbagai alternatif media penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat agraris. Pendekatan ini dilakukan melalui beberapa bentuk diversifikasi layanan. Pertama, penyediaan jadwal layanan lembaga keuangan yang fleksibel dan kompatibel dengan siklus aktivitas dan kesibukan masyarakat agraris. Kondisi pada saat ini menunjukkan bahwa jadwal operasional kantor perbankan tidak *matching* dengan siklus aktivitas dan kesibukan masyarakat agraris. Selain itu, jaringan perbankan masing-masing relatif terbatas di kawasan perdesaan (Yazid et al., 2021).

Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat agraris terhadap layanan lembaga keuangan menjadi rendah. Bentuk kongkrit implementasi fleksibilitas layanan perbankan dilakukan dengan cara mengatur jadwal mobil operasional yang berkunjung ke kawasan agraris pada waktu tertentu, misalnya pada saat sore hari atau akhir pekan. Jadwal kedatangan mobil operasional tersebut disesuaikan dengan siklus aktivitas masyarakat agraris.

Pendekatan diversifikasi layanan lainnya adalah berupa *branchless banking*. Pada model layanan ini, pihak lembaga keuangan bekerjasama dengan pihak ketiga yang berperan sebagai agen dari lembaga keuangan tersebut. Pendekatan ini sangat efektif untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh layanan lembaga keuangan. Pendekatan ini juga lebih efisien bagi perbankan, karena dapat menekan biaya operasional berupa pembangunan kantor cabang dan berbagai biaya operasional lainnya.

Pendekatan VI : Penyediaan Produk dan Layanan Keuangan berdasarkan prinsip syariah

Layanan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah merupakan sebuah hal yang mutlak bagi masyarakat agraris di Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan preferensi masyarakat agraris di Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, berbagai produk keuangan baik berupa pembiayaan, investasi dan tabungan yang ditawarkan harus berdasarkan prinsip syariah.

Preferensi masyarakat agraris di Aceh merupakan peluang bagi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Aceh. Berbagai lembaga keuangan syariah dapat menawarkan berbagai produk yang kompetitif. Beberapa produk keuangan yang potensial untuk ditawarkan antara lain kerjasama operasional agribisnis. (Yazid et al., 2021), wakalah wal mudharabah, wakalah wal musyarakah, wakalah wal murabahah, atau wakalah wal ijarah (Darwanto et al., 2019).

Konsep mudharabah dapat digunakan sebagai alternatif model pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat tani. Pendekatan mudharabah memiliki dampak secara mikro maupun secara makro terhadap aktivitas ekonomi. Dampak secara mikro antara lain memaksimalkan profit dan meminimalisir resiko kekurangan modal usaha. Sedangkan dampak secara makro adalah peningkatan ekonomi produktivitas masyarakat (Koni et

al., 2021). Alternatif lainnya yang dapat digunakan adalah murabahah. Pendekatan pembiayaan ini telah terbukti secara empiris berdampak terhadap profitabilitas pelaku usaha (Ismawati et al., 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi atribut layanan lembaga keuangan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan inklusi keuangan kepada kelompok masyarakat agraris. Kelompok masyarakat tersebut merupakan salah satu segmen masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. Pada saat ini, tingkat inklusi keuangan pada kelompok masyarakat ini masih sangat rendah.

Penelitian ini telah menghasilkan enam pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. Pertama, penyederhanaan administrasi pengajuan kredit bagi masyarakat agraris. Kedua, diseminasi pengetahuan tentang sektor jasa keuangan dan edukasi produk keuangan kepada masyarakat agraris. Ketiga, penyediaan kredit lunak dan kredit tanpa agunan kepada masyarakat agraris. Keempat, digitalisasi layanan keuangan kepada masyarakat agraris. Kelima, fleksibilitas sistem pengajuan kredit dan layanan perbankan bagi masyarakat agraris. Keenam, penyediaan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Berbagai pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai bauran kebijakan oleh pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris di Aceh.

Penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan meneliti kajian yang serupa pada segmen masyarakat yang berbeda di wilayah provinsi Aceh maupun di berbagai wilayah lainnya. Berbagai segmen yang perlu mendapat perhatian khusus lainnya antara lain ibu rumah tangga, generasi milenial, masyarakat tertinggal dan berbagai segmen lainnya yang telah ditetapkan dalam sepuluh kelompok sasaran peningkatan inklusi dan literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran penelitian yang serupa sangat penting dalam rangka mendukung tujuan Strategi Nasional Literasi Keuangan yaitu mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Teuku Umar selaku penyandang dana

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2019). *Mengukur Kualitas Layanan dengan Indeks Kepuasan, Importance Performance Analysis (IPA) dan Model Kano*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Anwar, A. Z., Susilo, E., Rohman, F., Santosa, P. B., & Gunanto, E. Y. A. (2019). Integrated financing model in Islamic microfinance institutions for agriculture and fisheries sector. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(4), 303–314. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(4\).2019.26](https://doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.26)
- Asnawi, A., Amrawaty, A. A., & Nirwana. (2019). A Study of Effect Agribusiness Micro Finance for Beef Cattle Farmers in South Sulawesi Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 334(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/334/1/012052>
- Asnawi, A., Mrawaty, A. A., & Nirwana. (2021). Effectiveness of microfinance institutions: Perspective of beef cattle farmers in Sinjai District, South Sulawesi Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 788(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/788/1/012205>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2023* (Issue 1).
- Blay, J. K., Sadick, M., & Decker, A. (2013). Accessibility Constraints Of Small- Scale Fish Farmers To Formal Credit In The Nzema East Municipality Related papers. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(1), 128–132.
- BPS Aceh. (2018). *Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Aceh*.
- Darwanto, Roessali, W., Woyanti, N., Salam, A. N., & Santosa, P. B. (2019). Sharia Microfinance Institutions Financing Model for Strengthening Agricultural Sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 292(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/292/1/012016>
- Darwis, V., Rachmawati, R. R., Muslim, C., Chanifah, Sembiring, A., Ilham, N., Mufidah, L., Suhartini, S. H., Basuki, R. S., Rina, Y., Suharyon, Nurdin, M., Dahya, Damanik, M., & Dewi, D. O. (2023). Transformation of financial institutions grants from the government to inclusive financial institutions in Indonesia. *PloS One*, 18(6), e0286482. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286482>
- Dawood, T. C., Pratama, H., Masbar, R., & Effendi, R. (2019). Does financial inclusion alleviate household poverty? Empirical evidence from Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 235–252. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/14>
- Dewi, S., Abd Majid, M. S., Aliasuddin, & Kassim, S. (2018). Dynamics of Financial Development, Economic Growth, and Poverty Alleviation: The Indonesian Experience. *South East European Journal of Economics and Business*, 13(1), 17–30. <https://doi.org/10.2478/jeb-2018-0002>
- Hariato, H., Hutagaol, M. P., & Widhiyanto, I. (2019). Sources and Effects of Credit Accessibility on Smallholder Paddy Farms Performance: an Empirical Analysis of Government Subsidized Credit Program in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(5), 1–10. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8388>
- Henning, J. I. F., Bougard, D. A., Jordaan, H., & Matthews, N. (2019). Factors affecting successful agricultural loan applications: The case of a South African credit provider. *Agriculture (Switzerland)*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/agriculture9110243>
- Herwartz, H., & Walle, Y. M. (2014). Openness and the finance-growth nexus. *Journal of Banking and Finance*, 48, 235–247.

- <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.031>
- Ismail, M. (2021). The direct effect of commercial banks on poverty reduction: evidence from provinces in Indonesia. *Applied Economics*, 53(56), 6497–6509. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1946474>
- Ismawati, D., Dailibas, & Mubarakah, I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 595.
- James B. Ang. (2010). A Survey of Recent Developments in the Literature of FDI-Led Growth Hypothesis. *Journal of World Investment and Trade*, 11(3), 536–576.
- Kiros, S., & Meshesha, G. B. (2022). Factors affecting farmers' access to formal financial credit in Basona Worana District, North Showa Zone, Amhara Regional State, Ethiopia. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2035043>
- Koni, A., Kurniawan, W., Hatta, I. M., Juhadi, J., & Albayan, A. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 274–285. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/866/>
- Lualhati, G. P., Manalo, G. V., Manalo, J. M., & Ramos, J. A. (2018). Satisfaction of Filipino Crop Farmers on Agricultural Credit. *International Journal of Applied Science*, 1(2), p21. <https://doi.org/10.30560/ijas.v1n2p21>
- Majid, M. S. A., Dewi, S., Aliasuddin, & Kassim, S. H. (2019). Does Financial Development Reduce Poverty? Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 10(3), 1019–1036. <https://doi.org/10.1007/s13132-017-0509-6>
- Mamun, A., Rana, M., & Islam, A. (2023). Exploring the factors that affecting adoption of mobile banking in Bangladesh. *Journal of Global Business Insights*, 8(1), 66–79. <https://www.doi.org/>
- Mwangi, I., & Atieno, R. (2018). Impact of Financial Inclusion on Consumption Expenditure in Kenya. *International Journal of Economics and Finance*, 10(5), 114. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n5p114>
- Ndem, B. E., Walter, M. H., Ovat, O. O., Henry, J. T., & Peter, L. M. (2023). Agricultural financing and economic performance in the Obudu local government area of cross River State, Nigeria. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 13(1), 39–48. <https://doi.org/10.55493/5005.v13i1.4754>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Ouattara, N., Xueping, X., BI, T. B. A. Y., Traoré, L., Ahiakpa, J. K., & Olounlade, O. A. (2020). Determinants of smallholder farmers' access to microfinance credits: A case study in Sassandra-Marahoué District, Côte d'Ivoire. *Agricultural Finance Review*, 80(3), 401–419. <https://doi.org/10.1108/AFR-07-2019-0075>
- Perpres RI Nomor 114 Tahun 2020. (2020). Peraturan Presiden RI. In *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif* (Issue 051209).
- Purmiyati, A., Berma, M., Talib, B. A., & Rakhima, M. S. (2019). The Role of Banking Capital in Industrial Sector Micro Enterprises for Poverty Alleviation: A Study in East Java, Indonesia. *Foundations of Management*, 11(1), 131–142.

- <https://doi.org/10.2478/fman-2019-0011>
- Safitri, K. A. (2021). An analysis of Indonesian farmer's financial literacy. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(4). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4489>
- Safitri, N., Permadi, I., & Fathussyaadah, E. (2022). Literasi Keuangan Digital, Keberlanjutan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keuangan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1203–1214. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2478>
- Shofiah, S. M., Fakhriza, M. A. K., & Prihartono. (2021). Pengaruh Kualitas Mobile Banking terhadap Kepuasan Nasabah Bank BJB. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Thomas, B., & Subhashree, P. (2020). Behavioural and psychological factors that influence the usage of formal financial services among the low income households. *Research in World Economy*, 11(5), 326–333. <https://doi.org/10.5430/rwe.v11n5p326>
- Wibowo, B. (2019). Bank Loan, Inflation, and Farmers Welfare: Data Analysis By Province in Indonesia. *Asian Development Policy Review*, 7(1), 23–30. <https://doi.org/10.18488/journal.107.2019.71.23.30>
- Widaninggar, N., Firdaus, M., Suherman, Wahyudi, F., & Sauqi, A. (2023). Analysis of the intention to use loan facilities from formal financial institutions for large chili farmers through the theory of planned behavior approach. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(2), 137–148. [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(2\).2023.12](https://doi.org/10.21511/imfi.20(2).2023.12)
- Widhiyanto, I., Nuryartono, N., & Siregar, H. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues The Analysis of Farmers' Financial Literacy and its' Impact on Microcredit Accessibility with Interest Subsidy on Agricultural Sector. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 148–159. <http://www.econjournals.com>
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa Desain Servqual, QFD, dan Kano* (Edisi Kedu). Indeks Jakarta.
- Wulandari, E., Meuwissen, M. P. M., Karmana, M. H., & Oude Lansink, A. G. J. M. (2017). Performance and access to finance in Indonesian horticulture. *British Food Journal*, 119(3), 625–638. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2016-0236>
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2021a). Sharia based economics in support of Indonesia's sustainable agricultural sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(3), 0–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032040>
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2021b). Sharia based economics in support of Indonesia's sustainable agricultural sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(3). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032040>
- Zouari, G., & Abdelhedi, M. (2021). Customer satisfaction in the digital era: evidence from Islamic banking. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00151-x>

TABEL

Tabel 1 : Profil Reponden

Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki Laki	Perempuan	

18 s.d 27 Tahun	39	87	126
28 s.d 37 Tahun	21	36	57
38 s.d 47 Tahun	13	12	25
48 s.d 57 Tahun	17	9	26
Di atas 58 Tahun	3	0	3
Total	93	144	237

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Tabel 2 : Hasil Identifikasi Atribut Layanan Menggunakan Model Kano

NO	Kode	Indikator	A	M	O	R	Q	I	AMO	RQI	Total	Kategori Kano
Dimensi Prosedur Pengajuan Kredit dan Tingkat suku Bunga/Margin												
1	PPT1	Persyaratan dokumen pengajuan kredit yang ringkas/ sederhana	62	35	56	4	16	64	153	84	237	A
2	PPT2	Ketersediaan informasi lengkap tentang persyaratan pengajuan kredit/pembiayaan	19	110	54	5	12	37	183	54	237	M
3	PPT3	Akad pembiayaan menyajikan secara komprehensif jumlah pembiayaan, tingkat bunga/margin dan tanggal jatuh tempo	30	92	63	5	9	38	185	52	237	M
4	PPT4	Agunan pembiayaan dapat dipenuhi dengan mudah oleh para nasabah	54	54	55	3	12	59	163	74	237	O
5	PPT5	Tingkat suku bunga/margin yang terjangkau	37	58	78	3	16	45	173	64	237	O
Dimensi Credit terms and Conditions												
6	CTC1	Tidak ada denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan kredit	50	33	58	8	10	78	141	96	237	O
7	CTC2	Nasabah mendapat diskon bunga/margin apabila melakukan pelunasan kredit lebih cepat dari tenornya.	50	52	58	9	16	52	160	77	237	O
8	CTC3	Nasabah dapat menunda pembayaran cicilan hingga musim panen tiba	39	34	86	5	11	62	159	78	237	O
9	CTC4	Fleksibilitas dalam menyetor cicilan bulanan	39	42	84	8	13	51	165	72	237	O
10	CTC5	Ketersediaan informasi tentang tingkat bunga/margin apabila nasabah melakukan pelunasan dengan jadwal yang berbeda dengan tenor pinjaman/kredit	21	95	73	4	15	29	189	48	237	M
Dimensi Shariah Compliance												
11	SC1	Produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah	33	85	56	5	12	46	174	63	237	M

12	SC2	Bank menyediakan produk investasi dengan sistem bagi hasil	47	64	56	6	14	50	167	70	237	M
<i>Dimensi Digitalization</i>												
13	DG1	Lembaga keuangan menyediakan layanan dan aplikasi <i>mobile banking</i>	38	78	64	3	13	41	180	57	237	M
14	DG2	Lembaga keuangan aktif di <i>platform</i> sosial media seperti instagam, facebook dll	39	61	60	1	12	64	160	77	237	M
<i>Dimensi Human skills</i>												
15	HS1	Jam operasional lembaga keuangan sesuai dengan kondisi nasabah yang dilayani	44	60	65	5	11	52	169	68	237	O
16	HS2	Pegawai memberi asistensi kepada nasabah ketika ada kendala dalam bertransaksi	16	136	58	2	7	18	210	27	237	M
17	HS3	Pegawai memberi informasi dengan tepat tentang jenis layanan yang tersedia pada lembaga keuangan	18	126	58	2	9	24	202	35	237	M

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Tabel 3 : Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris di Aceh

No	Bentuk Pendekatan	Ketekaitan dengan Atribut Layanan
1	Penyederhanaan administrasi pengajuan kredit bagi masyarakat agraris	PPT1
2	Diseminasi pengetahuan tentang sektor jasa keuangan dan edukasi produk keuangan kepada masyarakat agraris	PPT2, PPT3, CTC5, HS2, HS3
3	Penyediaan kredit lunak dan kredit tanpa agunan kepada masyarakat agraris	PPT4, PPT5
4	Digitalisasi layanan keuangan kepada masyarakat agraris	DG1, DG2
5	Fleksibilitas sistem pengajuan kredit dan layanan perbankan bagi masyarakat agraris	CTC1, CTC2, CTC3, CTC4, CTC5, HS1
6	Penyediaan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah	SC1, SC2

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023